

RINGKASAN

SHERLY PUTRI ASWIKA
NIM 210510266

**Impelementasi Pemanfaatan Ruang Pesisir
Laut di Kabupaten Aceh Besar (Studi
Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. dan
Hasan Basri, S.H., M.H.)**

Pemanfaatan ruang pesisir dan laut memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga harus dilaksanakan secara terencana, berbasis izin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut (PKKPRL). Namun, di Kabupaten Aceh Besar masih ditemukan pemanfaatan ruang pesisir tanpa izin, sehingga menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dan ketidaktertiban tata ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan ruang pesisir laut, mengidentifikasi kendala pengawasan, serta mengkaji upaya dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan ruang pesisir laut di Kabupaten Aceh Besar berjalan melalui mekanisme perizinan PKKPRL, pengawasan, dan pembinaan sesuai regulasi, namun belum optimal karena masih terdapat pemanfaatan tanpa izin, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pesisir laut meliputi keterbatasan SDM dan anggaran, luas wilayah pengawasan, akses lokasi yang sulit, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta sistem pengawasan yang belum berbasis data. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pesisir laut dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan perizinan PKKPRL, penguatan koordinasi, patroli berbasis prioritas, dan pelibatan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan meskipun belum signifikan.

Disarankan agar perlu penerapan pengawasan berbasis risiko yang terarah dan efisien disertai penyederhanaan perizinan PKKPRL, pengembangan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi terintegrasi untuk memperkuat koordinasi dan pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten melalui sanksi bertahap guna meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera.

Kata Kunci : Impelementasi, Pemanfaatan, Ruang Pesisir Laut, Aceh Besar.

SUMMARY

SHERLY PUTRI ASWIK *Implementation of Coastal and Marine Spatial Utilization in Aceh Besar Regency (Research Study at the Department of Marine Affairs and Fisheries of Aceh Besar Regency Government) (Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. and Hasan Basri, S.H., M.H.)*
NIM 210510266

The utilization of coastal and marine space has a strategic role in national development and therefore must be carried out in a planned and permit-based manner in accordance with Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs, Government Regulation Number 21 of 2021, and Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2021, which require the approval of the Conformity of Coastal and Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL). However, in Aceh Besar Regency, there are still cases of coastal space utilization without permits, which create potential environmental damage and spatial disorder.

This study aims to analyze the implementation of coastal and marine spatial utilization, identify supervision constraints, and examine efforts to achieve orderly, sustainable, and law-compliant spatial utilization. This research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. The study was conducted at the Department of Marine Affairs and Fisheries of Aceh Besar Regency. The data used are primary data obtained through interviews with respondents and informants. Data collection was carried out through library research and field research, while data analysis was conducted qualitatively.

The results show that the implementation of coastal and marine spatial utilization in Aceh Besar Regency has been carried out through PKKPRL licensing mechanisms, supervision, and guidance in accordance with regulations; however, it has not been optimal due to the persistence of unlicensed activities, limited resources, and low legal awareness. The constraints faced by the Department of Marine Affairs and Fisheries include limited human resources and budget, the wide scope of supervision areas, difficult access to certain locations, weak inter-agency coordination, low compliance among business actors, and a supervision system that is not yet data-based. Efforts undertaken include socialization, assistance in PKKPRL licensing, strengthening coordination, priority-based patrols, and community involvement, which have contributed to increased compliance, although not yet significant.

It is recommended to implement risk-based supervision that is more targeted and efficient, simplify PKKPRL licensing procedures, develop a data- and technology-based integrated supervision system to enhance coordination and prevent violations, and enforce stricter and more consistent law enforcement through progressive sanctions to improve compliance and create a deterrent effect.

Keywords: *Implementation, Utilization, Coastal and Marine Space, Aceh Besar.*